Representasi Masyarakat Subaltern dalam Novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* Karya Arafat Nur

Ardiansah Putra Perdana[1], Sugiarti[2]
[1]Universitas Muhammadiyah Malang, [2]Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: [1]ardiansahputra@webmail.umm.ac.id, [2]sugiarti@umm.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:
Received: 27/01/2026;
Revised: 26/03/2026;
Accepted: 30/04/2026;
Available online: 30/04/2026.

Keywords:
subaltern;
Spivak;
epistemic violence;
representation;
hegemonic power.

ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanisms of epistemic violence, the practices of representation that silence the subaltern voice, and to explain how hegemonic power operates in maintaining the subalternity of marginal characters within the social structure depicted in Kawi Matin di Negeri Anjing, a novel by Arafat Nur. Drawing on Gayatri Chakravorty Spivak's theory of the subaltern, this research employs a qualitative method with a postcolonial literary criticism approach through close textual reading of the novel's narrative, characters, and events. The findings reveal that the subaltern in the novel is not represented as a subject with the capacity to articulate personal experiences and interests. Epistemic violence functions by erasing the lived experiences of marginal characters from forms of knowledge recognized as legitimate, while representational practices position the subaltern as an object defined externally through labeling and social stigma. Furthermore, the continuous operation of hegemonic power across military, administrative, legal, and economic domains creates a structural condition that restricts the subaltern's access to social recognition, legal justice, and social mobility. This study concludes that the subaltern's failure to improve their social position is not the result of individual weakness, but rather of power structures that systematically limit the possibility of being heard and acknowledged. Accordingly, Kawi Matin di Negeri Anjing does not present a narrative of subaltern emancipation, but instead reinforces subalternity as a structural condition within postcolonial Indonesian society.

Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua with CC BY SA license, 2026.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kekerasan epistemik, praktik representasi yang membungkam suara subaltern, serta menjelaskan bagaimana hegemoni kekuasaan bekerja dalam mempertahankan subalternitas tokoh-tokoh marginal dalam struktur sosial yang digambarkan dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* karya Arafat Nur. Penelitian ini menggunakan teori subaltern Gayatri Chakravorty Spivak dan menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan kritik sastra postkolonial melalui pembacaan tekstual terhadap narasi, tokoh, dan peristiwa dalam novel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subaltern dalam novel tidak direpresentasikan sebagai subjek yang memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman dan kepentingannya sendiri. Kekerasan epistemik bekerja dengan menghapus pengalaman hidup tokoh-tokoh marginal dari produksi pengetahuan yang dianggap sah, sementara praktik representasi justru menempatkan subaltern sebagai objek yang didefinisikan dari luar melalui pelabelan dan stigma sosial. Selain itu, hegemoni kekuasaan yang berlangsung secara terus-menerus dalam ranah militer, administratif, hukum, dan ekonomi menciptakan kondisi struktural yang menutup akses subaltern terhadap pengakuan sosial, keadilan hukum, dan mobilitas sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan subaltern dalam memperbaiki posisi hidupnya bukan disebabkan oleh kelemahan individu, melainkan oleh struktur kekuasaan yang secara sistematis membatasi kemungkinan mereka untuk berbicara dan diakui. Dengan demikian, novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* tidak menghadirkan narasi pembebasan subaltern, melainkan menegaskan subalternitas sebagai kondisi struktural dalam masyarakat pascakolonial Indonesia.

Kata kunci: subaltern, spivak, kekerasan epistemik, representasi, kekuasaan hegemonik.

PENDAHULUAN

Penindasan, kekejaman, serta kesenjangan sosial warisan budaya kolonial nyatanya tidak pernah hilang dan terus muncul dalam praktik-praktik kekuasaan di negara ini. Salah satu contoh yang pernah muncul di antaranya adalah konflik politik yang pernah terjadi di Aceh. Sastra kontemporer Indonesia, sebagai bagian dari era postkolonial, memiliki perhatian

yang serius terhadap berbagai upaya karya fiksi dalam merekam berbagai konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah bagaimana sebuah karya berusaha merepresentasikan problematika kelompok masyarakat di luar lingkar kekuasaan yang sering kali terlupakan (Ratna, 2007). Untuk itulah, dalam lingkup Sastra Indonesia, analisis representasi terhadap tokoh yang terpinggirkan pada teks fiksi penting untuk dikembangkan.

Konflik sosial merupakan salah satu tema karya satra yang sering ditemui. Tak jarang, konflik sosial disajikan dengan mempertemukan berbagai tokoh yang memiliki relasi antara satu dengan yang lain. Relasi dan interaksi antar tokoh tersebut yang mampu menghidupkan cerita sehingga karya sastra mampu merefleksikan dan merepresentasikan permasalahan dalam kehidupan dunia nyata. Penelitian sastra merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi di masyarakat. Melalui penelitian-penelitian yang dilakukan dalam ilmu sastra akan diperoleh suatu bentuk kesadaran ideologis, berupa sejumlah tata nilai, dalam bentuk sarana introspeksi akan berbagai fenomena yang terjadi di dunia ini (Ikbar & Andalas, 2019:12: Indrapuri & Andalas, 2019:9).

Di antara beberapa teori yang berkembang di era pascakolinialisme, adalah toeri mengenai subaltern yang dicetuskan oleh Gayatri Chakravorty Spivak. Spivak memfokuskan permasalahan pascakolonialisme pada subalternitas. Istilah subaltern merujuk pada populasi yang secara sosial, politik dan geografis berada di luar struktur kekuatan hegemonik bangsa kolonial. Teori subaltern dapat digunakan untuk membaca karya sastra dalam era pascakolonialisme, yaitu era setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan menemukan jejak-jejak peninggalan era kolonialisme yang tercermin, tersirat, maupun tersurat dalam sebuah karya sastra.

Salah satu karya sastra yang menggambarkan konflik sosial yang terjadi di masyarakat adalah novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* karya Arafat Nur, terbitan Basabasi (Yogyakarta) pada tahun 2020, dengan panjang sekitar 172 halaman. Arafat Nur sendiri merupakan penulis kelahiran Aceh yang telah memenangi berbagai penghargaan sastra tingkat nasional diantaranya Kusala Sastra Khatulistiwa (2011), Dewan Kesenian Jakarta (2010), dan Dewan Kesenian Jakarta (2016) untuk berbagai karya ciptaannya. Novel ini berkisah tentang kehidupan masyarakat yang mengalami kekerasan, kemiskinan, dan dominasi aparat pasca konflik politik yang pernah terjadi di Aceh. Permasalahan dalam novel tersebut menunjukkan bagaimana bentuk penderitaan yang dialami seorang tokoh bernama Kawi Matin, seorang cacat kaki yang menjadi korban nasib buruk dan ketidakadilan dalam hidupnya. Tragisnya, dalam proses menuntut keadilan, yang ia temui justru kekejaman oleh orang-orang yang selama ini ia percaya. Selain Kawi Matin, terdapat pula tokoh-tokoh yang mengalami nasib yang tidak kalah buruk. Tokoh-tokoh tersebut digambarkan seolah-seolah sebagai korban dari kacaunya struktur kekuasaan dan konflik sosial yang muncul di dalam novel.

Dalam novel tersebut, para tokohnya digambarkan memiliki nasib tragis akibat ketidakberdayaannya menghadapi sebuah hegemoni kekuasaan dari struktur sosial yang berlaku di dalam masyarakat Aceh pasca konflik politik. Hal tersebut menjadikan representasi tokoh dalam *Kawi Matin di Negeri Anjing* dapat memunculkan sebuah pertanyaan dan perdebatan tentang kemampuan atau ketidakmampuan mereka untuk berbicara dan memperjuangkan nasib dalam struktur masyarakat. Gayatri C. Spivak, salah satu tokoh dalam teori postkolonial, menegaskan bahwa subaltern adalah kelompok yang tidak memiliki akses terhadap representasi (*no access to hegemonic discourse*), sehingga suara mereka tidak pernah menjadi bagian dari produksi makna yang sah dalam masyarakat (Spivak, 1988). subaltern bukan sekadar kelompok tertindas, melainkan mereka yang posisinya berada di luar jangkauan struktur representasi politik dan epistemik. Jika dibaca lebih dalam, tokoh-tokoh di

dalam Kawi Matin di Negeri Anjing menghadirkan kisah masyarakat biasa dengan berbagai penderitaannya. Penderitaan yang mereka alami bukanlah murni karena nasib buruk, melainkan akibat dari adanya bentuk kekerasan dalam sebuah praktik hegemoni kekuasaan. Mereka mengalami berbagai macam ketidakadilan dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki nasib dan hidupnya.

Sepanjang penulusuran terhadap novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* karya Arafat Nur, ditemukan beberapa penelitian atau kajian terhadap novel tersebut. Pertama dengan judul *Nilai Moral Dalam Novel Kawi Matin di Negeri Anjing Karya Arafat Nur* yang dilakukan oleh Wahid Tahun 2021 menyimpulkan bahwa bahwa dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* memunculkan berbagai aspek moral, meliputi representasi ketabahan, penindasan, tolong-menolong, dan kasih sayang. Penelitian kedua dengan judul *Ego dan Shadow Tokoh Utama Dalam Novel Kawi Matin di Negeri Anjing Karya Arafat Nur (Perspektif Psikologi Jungian)* oleh Tillah dkk, tahun 2021 menunjukkan bahwa bahwa gambaran ego pada tokoh utama dalam novel Sedangkan penelitian ketiga dengan judul *Bahasa Politik Novel Kawi Matin di Negeri Anjing Karya Arafat Nur* yang dilakukan oleh Latifah dkk. Tahun 2022 dengan kesimpulan bahwa bahasa politik digunakan dalam novel pada persoalan kebijakan kepemerintahan dalam masa usaha menyingkirkan para pejuang kemerdekaan rakyat Aceh. Ketiga penelitian yang telah dilakukan tersebut, sama-sama menempatkan novel sebagai *Kawi Matin di Negeri Anjing* sebagai objek penelitian, namun dengan berbagai fokus penelitian yang berbeda namun dalam ruang lingkup tentang tema utama novel. Belum ditemukan adanya penelitian yang berupaya mengkaji *Kawi Matin di Negeri Anjing* dengan menggunakan teori subaltern Gayatri Spivak.

Sedangkan pada pembahasan subaltern, terdapat pula beberapa penelitian di antaranya adalah *Subaltern Pada Novel Jemini Karya Suparto Brata (Perspektif Gayatri Spivak)* oleh Andriyanto dkk tahun 2021, yang menghasilkan penggambaran tokoh subaltern yang pada akhirnya mampu naik kelas dan mendapatkan segala kemudahan akses dari penjajah Belanda. Penelitian berikutnya adalah *Subaltern dalam Novel Arok Dedes Karya Pramoedya Ananta Toer: Kajian Poskolonial Gayatri Spivak oleh Kholifatu dkk* tahun 2020. Hasil penelitian tersebut membuktikan adanya pengaruh tahta tertinggi dalam subaltern dalam novel Arok Dedes karya Pramoedya Ananta Toer dan juga wujud perlawanan kaum subaltern yang dilakukan Arok Dedes terhadap penguasa di dalam novel.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah ditemukan, nampak belum adanya penerapan teori subaltern yang tepat dalam membedah karya sastra yang dipilih. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bagaimana subaltern pada akhirnya mampu naik kelas dan menjadi bagian dari kekuasaan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip Gayatri Spivak. Selain itu, penelitian yang berfokus pada representasi subaltern dengan objek kajian novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* belum pernah dilakukan. Padahal, novel yang bercerita tentang masa konflik di Aceh tersebut, berpotensi untuk digali lebih dalam sehingga mampu memberikan kesadaran baru tentang fenomena subaltern yang terdapat di dalam masyarakat.

Untuk itulah penelitian ini penting dilakukan karena tiga alasan. Pertama, secara teoretis, kajian ini memperkaya studi poskolonial dan kajian subaltern dalam konteks sastra Indonesia dengan menempatkan Kawi Matin di Negeri Anjing sebagai studi kasus kontemporer. Kedua, secara metodologis, analisis ini menawarkan pendekatan yang mampu mengurai bagaimana mekanisme representasi subaltern bekerja di dalam teks sastra. Ketiga, secara sosial, pemahaman terhadap bagaimana tokoh-tokoh marginal direpresentasikan dapat membantu pembaca untuk dapat melihat posisi dan merasakan manfaat karya sastra terhadap bagaimana wacana subaltern dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam masyarakat.

Penelitian ini fokus kepada teori subaltern yang digagas oleh Gayatri Chakravorty Spivak di dalam kerangka besar teori postkolonial, sebagai landasan untuk menelaah kemungkinan dan batasan bagaimana subaltern direpresentasikan. Postkolonialisme adalah teori yang lahir setelah sebagian negara-negara terjajah memperoleh kemerdekaannya. Ciri khas postkolonialisme adalah kenyataan bahwa objeknya merupakan teks-teks yang berkaitan dengan wilayah bekas jajahan imperium Eropa. Teori Postkolonialisme merupakan cara-cara yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural, seperti sejarah, politik, ekonomi, sastra dan berbagai dokumen lainnya (Ratna, 2008:90).

Salah satu pilar dalam teori postkolonial adalah konsep Subaltern yang dipopulerkan oleh Gayatri Chakravorty Spivak. Spivak (1999) menyatakan bahwa subaltern bukan sekadar kelompok tertindas atau miskin, tetapi subjek yang tidak memiliki posisi untuk mengkonstitusi diri dalam wacana, yang berarti bahwa mereka terperangkap dalam relasi kuasa yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak mampu mempengaruhi struktur yang menindas mereka. Indikator pertama dari teori ini adalah ketidakmampuan tokoh untuk dapat memproduksi pengetahuan tentang dirinya sendiri. Kedua, Spivak juga menyoroti bahwa subaltern tidak mampu untuk berbicara secara langsung, melainkan selalu dimediasi oleh figur atau institusi yang lebih berkuasa (Spivak, 1988). Spivak mencoba melihat secara dekonstruktif mengenai kehadiran subjek subaltern tersebut dengan mengkritisi pihak representatif yang seolah-olah mengetahui para subaltern. Berikutnya, yang ketiga adalah adanya hegemoni kekuasaan dalam berbagai bidang sehingga muncul kelompok yang tidak dapat memasuki wacana dominan, cenderung sebagai objek dan tidak mampu berperan sebagai subjek dalam masyarakat.

Teori representasi yang diungkapkan oleh Stuart Hall juga digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Menurut Hall, representasi merupakan penggunaan bahasa untuk menyampaikan sesuatu yang bermakna kepada orang lain. Representasi adalah sebuah praktik mengonstruksi makna menggunakan tanda dan bahasa (Hall, 2003). Representasi merupakan cerminan dari kehidupan nyata dari masyarakat dalam sebuah karya sastra (Wanti, 2014). Dalam kehidupannya, bahasa digunakan mengonstruksi dan makna-makna yang ada di sekitar kehidupan manusia. Bahasa adalah media istimewa dimana makna-makna diproduksi dan dipertukarkan. Bahasa dianggap sebagai pusat makna dan budaya (Hall, 2003). Sehingga dapat disimpulkan bahwa representasi adalah proses produksi makna menggunakan bahasa.

Dengan dasar teori itulah penelitian ini menelusuri teks dan berfokus terhadap analisis pada aspek representasi subaltern dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* karya Arafat Nur dengan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk kekerasan epistemik, praktik representasi, serta adanya hegemoni kekuasaan ditunjukkan dalam cerita sehingga memunculkan kelompok masyarakat yang dikenal sebagai para subaltern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks sastra, berlandaskan teori subaltern Gayatri Chakravorty Spivak dalam kerangka kajian postkolonial. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran ketidakmampuan tokoh untuk dapat memproduksi pengetahuan tentang dirinya sendiri, tentang permasalahan keterwakilan suara tokoh, serta bagaimana dominasi kekuasaan bekerja dan muncul dalam struktur naratif novel. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah teks novel *Kawi Matin di Negeri Anjing karya* Arafat Nur. Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka dengan pembacaan mendalam terhadap novel untuk mengidentifikasi bagian-bagian teks yang relevan dengan konsep subaltern Spivak.

Seluruh data penelitian ini berupa teks narasi, dialog, dan deskripsi peristiwa yang menunjukkan adanya praktik pembungkaman, mediasi suara, serta ketimpangan akses terhadap wacana dominan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka dengan pembacaan intensif dan berulang terhadap teks novel secara menyeluruh. Proses pembacaan diarahkan untuk menandai dan mencatat bagian-bagian teks yang menunjukkan praktik dominasi, pembungkaman suara, serta representasi tokoh melalui perantara. Kutipan-kutipan teks yang relevan kemudian dicatat dan dikelompokkan ke dalam data penelitian berdasarkan kesesuaian dengan fokus kajian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif. Analisis dilakukan dengan memilah data yang relevan, mengelompokkan kutipan teks berdasarkan pola relasi kuasa dan representasi tokoh, serta menafsirkan makna teks secara interpretatif-kritis. Proses interpretasi difokuskan pada bagaimana struktur naratif dan relasi kuasa dalam novel membentuk posisi tokoh yang tidak memiliki akses langsung terhadap wacana dominan.

Penelitian ini tidak menetapkan subaltern sebagai kategori awal, melainkan menemukannya melalui pembacaan indikator kekerasan epistemik, permasalahan representasi, dan hegemoni kekuasaan sebagaimana dirumuskan oleh Spivak, sehingga subalternitas dipahami sebagai hasil relasi struktural dalam teks, bukan sebagai label sosial yang dilekatkan sejak awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* menceritakan berbagai bentuk kekerasan dan dominasi yang dialami oleh sebuah komunitas masyarakat desa akibat praktik kekuasaan yang dilakukan oleh militer, negara, maupun tokoh-tokoh lainnya. Cerita tersebut dapat merepresentasikan bagaiamanakah masyarakat subaltern mengalami berbagai macam bentuk kekerasan epistemik, permasalahan representasi dan keterwakilan, serta dominasi hegemoni kekuasaan sesuai dengan pemikiran Gayatri C. Spivak.

Kekerasan Epistemik

Analisis terhadap *Kawi Matin di Negeri Anjing* menunjukkan bahwa subalternitas pertama-tama diproduksi melalui praktik kekerasan epistemik, yakni penghapusan akses subjek marginal terhadap sistem pengetahuan yang diakui dan dianggap sah. Dalam kerangka Spivak, kekerasan epistemik bukan sekadar ketiadaan informasi, melainkan proses struktural yang menghalangi subjek terjajah untuk memproduksi pengetahuan tentang dirinya sendiri dan pengalamannya (Spivak, 1988).

Kondisi ini tampak ketika Rahman menghadapi kelahiran anaknya yang mengalami disabilitas fisik. Alih-alih memperoleh penjelasan medis atau dukungan institusional, Rahman hanya dapat "*membuka-buka sebuah kitab usang, mencari-cari nama semacam penangkal*" (hlm. 2). Kutipan ini tidak sekadar menunjukkan keterbatasan ekonomi atau kepercayaan tradisional, melainkan menandai absennya negara dan institusi pengetahuan formal dalam kehidupan subjek subaltern. Dalam perspektif Spivak, situasi tersebut memperlihatkan bahwa subaltern tidak berada dalam sirkuit produksi pengetahuan yang sah, sehingga pengalaman tubuh dan penderitaannya tidak pernah dikonstruksi sebagai pengetahuan yang diakui secara sosial.

Kekerasan epistemik juga bekerja melalui internalisasi nilai dan stigma oleh subjek subaltern itu sendiri. Ketika tokoh dengan disabilitas fisik memandang dirinya sebagai tidak layak mencintai atau dicintai; "*kaki cacat itu telah membuatnya tidak layak mencintai gadis mana pun"* (hlm. 82)—novel ini menunjukkan bagaimana subjek subaltern memahami dirinya melalui bahasa penilaian dominan. Ketidaklayakan tersebut bukan berasal dari kesadaran

pribadi, melainkan dari norma sosial yang telah lebih dahulu mendefinisikan kondisi fisik tertentu sebagai kekurangan. Dalam konteks ini, kekerasan epistemik bekerja dengan membuat subaltern berbicara melalui kategori yang dipaksakan kepadanya, bukan melalui pengetahuan tentang dirinya sendiri.

Logika yang sama tampak dalam perlakuan terhadap bayi perempuan berkulit terang dan berambut pirang yang *"hingga usia setahun belum juga diberikan nama"* karena dianggap *"tidak mirip anak orang miskin"* (hlm. 67). Penundaan pemberian nama ini menunjukkan bahwa pengakuan identitas subjek ditentukan oleh kategori sosial tertentu, bukan oleh keberadaannya sebagai manusia. Identitas subaltern dengan demikian tidak lahir secara alamiah, melainkan disaring melalui rezim pengetahuan dan klasifikasi sosial yang dominan. Dalam kerangka Spivak, kondisi ini menegaskan bahwa subaltern tidak pernah hadir sebagai subjek epistemik yang utuh, melainkan selalu ditempatkan sebagai objek penilaian dan pengelompokan.

Dengan demikian, kekerasan epistemik dalam novel ini tidak dapat dipahami sebagai akibat dari kebodohan atau keterbelakangan individu, melainkan sebagai mekanisme struktural yang bekerja melalui absennya institusi pengetahuan formal dan internalisasi nilai dominan oleh subjek subaltern. Novel ini tidak sekadar mengilustrasikan konsep kekerasan epistemik Spivak, tetapi menunjukkan bagaimana subalternitas diproduksi sejak level paling dasar, yakni pada ketidakmampuan subjek untuk memahami dan memaknai dirinya sendiri di luar kategori yang ditentukan oleh kekuasaan.

Ketiadaan pengetahuan medis dalam Kawi Matin di Negeri Anjing tidak dapat dipahami sebagai pilihan kultural masyarakat desa, melainkan sebagai akibat struktural dari absennya negara dan institusi pengetahuan formal dalam kehidupan subjek subaltern. Novel secara eksplisit menegaskan kondisi tersebut melalui keterangan bahwa "*tidak ada pos kesehatan pembantu sehingga orang-orang lebih sering berobat ke dukun daripada susah-payah pergi ke rumah sakit di kota Lhamlok*" (hlm. 10). Kutipan ini menunjukkan bahwa praktik pengobatan tradisional bukanlah preferensi bebas, melainkan satu-satunya kemungkinan epistemik yang tersedia bagi masyarakat subaltern akibat penyingkiran institusional.

Dalam kerangka Spivak, situasi ini menandai posisi subaltern yang tidak pernah *"enter into the circuits of knowledge production"* (Spivak, 1999). Pengetahuan yang mereka miliki dan praktikkan tidak pernah diakui sebagai pengetahuan yang sah, melainkan direduksi sebagai kekurangan, ketertinggalan, atau penyimpangan. Kekerasan epistemik, dengan demikian, bekerja bukan melalui larangan langsung, tetapi melalui penutupan akses terhadap mekanisme produksi dan lpengakuan dari sebuah pengetahuan diri.

Mekanisme yang sama kemudian beroperasi dalam konteks kekerasan politik. Pengalaman kekerasan yang dialami masyarakat Aceh tidak pernah diartikulasikan sebagai pengetahuan historis yang sah, melainkan selalu ditafsirkan melalui kacamata negara dan militer. Orang-orang sipil yang "*tidak dikenali sebagai pemberontak*" digambarkan "*hilang perlahan*" dan mereka yang memiliki relasi sosial tertentu "*dianggap sebagai pengikut pembangkang*" (hlm. 15). Dalam situasi ini, identitas subjek tidak ditentukan oleh tindakan atau pengalaman mereka sendiri, melainkan oleh kategori yang diproduksi kekuasaan.

Kekerasan epistemik mencapai bentuk paling brutal ketika penculikan dan pembunuhan dilakukan tanpa dasar hukum maupun pembuktian, bahkan atas alasan tidak suka; *"Kebanyakan penduduk yang mereka culik dan mereka tembak tidak ada kaitannya dengan pemberontak, tetapi atas alasan tidak suka*" (hlm. 40). Kekerasan semacam ini tidak hanya menghilangkan tubuh subjek secara fisik, tetapi juga meniadakan kemungkinan pengalaman mereka diakui sebagai peristiwa yang bermakna secara epistemik. Dalam istilah Spivak,

subaltern tidak hanya dibungkam, tetapi disingkirkan dari kemungkinan menjadi sumber pengetahuan tentang kekerasan yang menimpa dirinya sendiri.

Dengan demikian, novel ini memperlihatkan bahwa kekerasan epistemik bekerja secara konsisten dari ranah keseharian hingga ranah politik. Absennya layanan medis, delegitimasi pengetahuan lokal, serta penghapusan pengalaman kekerasan dari narasi resmi menunjukkan satu mekanisme yang sama, yakni penyingkiran sistematis subjek subaltern dari ruang produksi dan pengakuan pengetahuan. Penculikan dan pembunuhan dalam Kawi Matin di Negeri Anjing tidak hanya berlangsung tanpa pertanggungjawaban hukum, tetapi juga tanpa pengakuan sebagai peristiwa historis yang bermakna. Kekerasan tersebut direduksi, diperkecil, atau bahkan dihapus dari wacana publik, sebagaimana tampak dalam komentar sinis bahwa *"hanya belasan saja yang mati"* sementara *"di sini, ribuan orang Aceh mereka bantai, dunia tenang-tenang saja"* (hlm. 74). Kutipan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengalaman lokal subjek subaltern dan narasi resmi yang beredar melalui media dan negara.

Penghapusan epistemik tersebut bekerja melalui mekanisme pelabelan yang dilegitimasi negara. Setelah pembunuhan dilakukan, korban secara sepihak dikonstruksi sebagai "pemberontak", sehingga kekerasan yang menimpa mereka dapat dibenarkan dan bahkan diberi ganjaran simbolik. Narasi; "*Saat kembali ke Jakarta, prajurit yang melenyapkan nyawa itu segera dinaikkan pangkat-sebagaimana janji negara atas jasanya melenyapkan pembangkang*" (hlm. 63) menegaskan bahwa negara tidak hanya membiarkan kekerasan tersebut, tetapi secara aktif mengintegrasikannya ke dalam sistem penghargaan institusional. Dalam konteks ini, kematian subaltern tidak dipahami sebagai tragedi atau pelanggaran, melainkan sebagai jasa politik.

Dalam kerangka Spivak, kondisi ini memperlihatkan bagaimana subaltern tidak hanya kehilangan tubuhnya, tetapi juga kehilangan kemungkinan untuk menjadi sumber narasi tentang kematiannya sendiri. Pengalaman kekerasan yang dialami subaltern tidak pernah hadir sebagai pengetahuan historis yang sah, melainkan diserap dan ditafsirkan sepenuhnya melalui bahasa kekuasaan. Inilah bentuk ekstrem dari kekerasan epistemik, ketika subjek subaltern dihapus dari sejarah bukan karena ketiadaan peristiwa, melainkan karena peristiwa tersebut sejak awal didefinisikan ulang oleh wacana dominan (Spivak, 1999). Dengan demikian, novel ini menunjukkan bahwa penghapusan subaltern tidak berhenti pada level fisik, tetapi berlanjut pada level epistemik dan ruang sejarah. Kematian mereka tidak hanya tidak diadili, tetapi juga tidak diingat sebagai pengalaman subjek yang bermakna, sehingga subaltern sepenuhnya dikeluarkan dari kemungkinan berbicara, bahkan setelah kematiannya.

Permasalahan Representasi dan Keterwakilan

Masalah krisis representasi dalam novel ini dapat dipahami melalui pembedaan Spivak antara *representation as Darstellung* (penggambaran) dan *representation as Vertretung* (perwakilan politik). Spivak menegaskan bahwa *"there is no unrepresented subaltern subject that can know and speak itself"* (Spivak, 1988), yakni tidak pernah ada subaltern yang hadir sebagai subjek yang sepenuhnya berbicara atas dirinya sendiri di luar struktur representasi kekuasaan. Dalam novel ini, masyarakat kampung tidak pernah tampil sebagai subjek yang menyuarakan pengalaman mereka, melainkan selalu hadir sebagai objek yang didefinisikan dari luar.

Pelabelan masyarakat kampung sebagai polos, lugu, dan dungu; *"sekawanan tantara memasuki kampung, dan lebih dulu membuat perhitungan dengan orang-orang kampung yang polos, lugu, dan dungu, termasuk Rahman, yang berkali-kali terkena terjangan di perutnya"* (hlm. 14) bukan sekadar deskripsi naratif, melainkan pembentukan wacana yang

mereduksi kompleksitas pengalaman sosial mereka. Representasi semacam ini berfungsi untuk menormalisasi kekerasan yang kemudian menimpa mereka, sebagaimana terlihat dalam adegan pemukulan terhadap Rahman oleh aparat bersenjata. Dengan kata lain, penggambaran (*Darstellung*) tentang kepolosan dan kebodohan warga kampung sekaligus membuka ruang bagi perwakilan politik (*Vertretung)* yang sepenuhnya diambil alih oleh negara dan aparatnya.

Logika yang sama bekerja dalam narasi tentang pengiriman tentara oleh Pemerintah Jakarta untuk memberangus para pejuang kemerdekaan di Aceh; *"Waktu itu pertengahan tahun 1990, sejumlah tentara sengaja dikirimkan Pemerintah Jakarta untuk memberangus para pejuang kemerdekaan yang berkeliaran di sejumlah wilayah Aceh"* (hlm. 14). Dalam konteks ini, representasi warga sebagai "pejuang kemerdekaan" atau "pemberontak negara" tidak memberi ruang bagi arti posisi mereka sendiri, melainkan berfungsi sebagai justifikasi politik atas tindakan represif. Identitas subaltern ditetapkan secara sepihak, dan dari penetapan itulah kekerasan memperoleh legitimasi.

Narasi bahwa hampir tidak ada penduduk Aceh yang luput dari pukulan, tendangan, dan siksaan tentara; "*hampir tidak ada penduduk di Aceh yang tidak merasakan pukulan, tendangan lars, dan hantaman pangkal bedil tantara, seolah-olah tugas utama serdadu di negara ini hanya untuk memukuli dan menyiksa rakyat"* (hlm. 15) memperlihatkan bahwa representasi tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi secara aktif memproduksi realitas politik tertentu. Dalam situasi ini, subaltern tidak memiliki kesempatan untuk menyangkal, menjelaskan, atau menegosiasikan identitas yang dilekatkan pada mereka. Mereka hadir hanya sebagai efek dari wacana kekuasaan, bukan sebagai subjek yang berdaya bicara.

Mekanisme representasi yang menindas dalam novel ini juga bekerja pada level sosial yang lebih kecil, sebagaimana tampak pada sosok Kawi yang distigmatisasi melalui penanda-penanda sosial seperti pakaian lusuh, ketidakhadiran di sekolah, dan kegagalan akademik; "*Kawi tidak lulus ujian nasional dan guru-guru semakin tidak suka padanya karena dia kerap berpakaian lusuh, tidak memakai sepatu, dan sering tidak masuk sekolah*" (hlm. 61). Penanda tersebut tidak berfungsi untuk menjelaskan kondisi material dan struktural yang membentuk hidup Kawi, melainkan untuk mengunci posisinya sebagai subjek yang tidak layak diperhitungkan. Dengan demikian, Kawi tidak direpresentasikan sebagai individu dengan pengalaman historis tertentu, melainkan sebagai efek dari stigma sosial yang telah mapan. Inilah bentuk krisis representasi, ketika subaltern terus-menerus dihadirkan melalui label, tanpa pernah diberi ruang untuk memproduksi representasi tentang dirinya sendiri.

Spivak secara eksplisit memperingatkan bahaya ini ketika menyatakan bahwa *"to represent the subaltern is also to silence them"* (Spivak, 1988). Novel ini tidak menampilkan subaltern yang gagal menyampaikan suara, melainkan memperlihatkan bagaimana suara tersebut sejak awal telah disita oleh wacana dominan. Penyitaan itu tidak hanya dilakukan oleh negara atau aparat kekuasaan, tetapi juga oleh elite lokal yang mengklaim diri sebagai wakil perjuangan masyarakat Aceh. Narasi tentang para pemimpin pejuang yang memburu jabatan politik dan menjadi bagian dari struktur kekuasaan negara; *"Pemimpin-pemimpin pejuangnya memburu jabatan di dewan dan begitu berhasrat menjadi kepala daerah, yang tidak lain menjadi kaki-tangan pemerintah Jakarta di Aceh"* (hlm. 136) menunjukkan bahwa perwakilan politik *(Vertretung)* tidak pernah benar-benar berpihak pada pengalaman hidup masyarakat subaltern yang hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan. Representasi yang mereka klaim justru berfungsi untuk melanggengkan jarak antara elite dan rakyat yang mereka wakili. Keganjilan representasi tersebut semakin jelas ketika Kawi mempertanyakan kemewahan hidup seorang pemimpin pemberontak di tengah situasi perang yang berkepanjangan; *"bagaimana mungkin seorang pemimpin pemberontak yang hidup dalam*

kecamuk perang tanpa tanda jeda bisa membangun rumah sebegitu megah, mewah, dan dia bisa hidup seperti pejabat tinggi pemerintah" (hlm. 138). Pertanyaan ini tidak memperoleh jawaban dalam struktur sosial yang ada, karena representasi telah sepenuhnya dimonopoli oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Dalam konteks ini, subaltern bukan hanya tidak diwakili, tetapi juga disingkirkan dari kemungkinan untuk mengoreksi klaim perwakilan yang mengatasnamakan mereka.

Permasalahan representasi juga bekerja pada tingkat simbolik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Minimnya pelayat dalam kematian anggota keluarga Kawi Matin yang miskin; "*Hanya ada satu dua pelayat datang, bukan untuk menghibur duka keluarga, melainkan lebih didorong perasaan tidak. Karena keluarga itu miskin, mereka yang datang tidak mendapatkan apa-apa selain air putih"* (hlm. 26) dan juga; *"Tidak sebagaimana biasa bila musibah menimpa orang kaya yang segera mengubah suasana rumah duka seperti pesta"* (hlm. 29) menunjukkan bahwa subaltern tidak memiliki nilai representasional, bahkan dalam komunitasnya sendiri. Kematian mereka tidak diperlakukan sebagai peristiwa sosial yang bermakna, melainkan sebagai kejadian biasa yang nyaris tak layak diingat. Subaltern hadir sebagai sosok yang miskin secara material sekaligus miskin secara simbolik, diabaikan bukan hanya oleh struktur kekuasaan, tetapi juga oleh masyarakat yang sesungghunya sama-sama terpinggirkan.

Kondisi ini mencapai bentuk paling bertolak belakang ketika Kawi Matin tidak diakui sebagai pejuang oleh elite bekas pejuang itu sendiri; "*Namun, dia benar-benar tidak diakui sebagai pejuang. Dia begitu sakit hati pada gubernur yang sekarang memang sudah berbalik haluan"* (hlm. 144). Dalam situasi tersebut, subaltern terjebak dalam posisi yang sangat terbatas, dia tidak sepenuhnya menjadi subjek, tetapi juga tidak sepenuhnya diakui sebagai objek perjuangan. Hal ini sejalan dengan kritik Spivak bahwa subaltern kerap "*disappear into the violent shuttling between subject and object"* (Spivak, 1999), yakni menghilang di antara klaim-klaim representasi yang saling bertabrakan, tanpa pernah benar-benar hadir sebagai subjek yang berbicara.

Hegemoni Kekuasaan

Puncak analisis penelitian ini terletak pada temuan bahwa subaltern berada dalam kondisi yang secara struktural tidak memungkinkan mereka untuk berbicara, sebagaimana dikemukakan Spivak dalam esainya *Can the Subaltern Speak*? Pernyataan Spivak bahwa "*the subaltern cannot speak*" (Spivak, 1988) tidak berarti bahwa subaltern tidak memiliki suara, melainkan bahwa suara mereka tidak pernah diterima atau diakui sebagai suara yang sah. Dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing*, kondisi ini muncul karena bekerjanya kekuasaan militer, administrasi negara, hukum, dan ekonomi secara bersamaan dan saling menguatkan.

Dominasi militer dalam novel tidak hanya tampak dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga melalui aturan dan perintah yang tidak dapat ditawar. Warga kampung tidak memiliki ruang untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi ketika berhadapan dengan perintah tentara. Bahkan dalam kondisi darurat, seperti sakit parah atau kematian anggota keluarga, perintah aparat tetap harus dipatuhi; *"Tak seorang pun berani mengabaikan perintah serdadu-sekalipun ibumu sedang sekarat-termasuk Rahman yan mengabaikan bengek istrinya yang kambuh"* (hlm. 36). Dalam situasi ini, kepatuhan bukan lagi pilihan, melainkan satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Rasa takut warga semakin kuat dengan keberadaan pos-pos penjagaan yang mengontrol pergerakan mereka, sehingga akses menuju fasilitas kesehatan pun terhambat oleh alasan keamanan militer; *"Namun, tidak seorang pun berani membawanya, bilapun seseorang di Kareung memiliki kereta motor. Di sejumlah jalan yang mereka lalui melewati banyak pos penjagaan tentara yang selalu melakukan pemeriksaan*

terhadap siapa saja" (hlm. 56). Negara tidak hadir sebagai pelindung, melainkan sebagai kekuatan yang justru membatasi kemungkinan hidup subaltern.

Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus membuat warga selalu berada dalam posisi bersalah. Para penjaga malam digambarkan tidak pernah benar, apa pun yang mereka lakukan selalu dianggap salah (hlm. 39; hlm. 53). Tidak ada aturan yang jelas tentang apa yang dimaksud sebagai kepatuhan, sehingga warga tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan atau membela diri. Dalam kondisi seperti ini, berbicara bukanlah sarana untuk menyampaikan pendapat, melainkan justru berisiko mendatangkan hukuman. Subaltern dibungkam bukan karena memilih diam, tetapi karena berbicara tidak pernah memberi hasil apa pun. Situasi ini sesuai dengan pandangan Spivak bahwa subaltern tidak memiliki akses terhadap jalur-jalur yang memungkinkan perubahan posisi sosial (Spivak, 1999). Ketidakmampuan untuk berbicara berkaitan langsung dengan tertutupnya akses terhadap lembaga-lembaga resmi. Hal ini terlihat ketika permohonan administratif warga miskin ditolak secara mutlak, bahkan untuk hak dasar seperti pengakuan status miskin; *"aku tidak akan mengeluarkan surat miskin untuknya," sembur Samsul dengan wajahnya yang merah. "Tidak untuk tahun depan, tidak juga sepuluh tahun akan datang. Biar saja dia dan ibunya mati membusuk di rumah tua buruk itu!"* (hlm. 147). Penolakan tersebut menunjukkan bahwa institusi negara tidak menyediakan ruang bagi subaltern untuk menyampaikan kepentingannya, melainkan justru menjaga jarak dan menutup kemungkinan tersebut.

Hegemoni negara dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* tidak hanya ditunjukkan melalui kekerasan fisik, tetapi juga melalui aturan administratif dan hukum yang mengatur siapa yang diakui sebagai warga yang sah. Dalam novel ini, kepemilikan kartu pengenal menjadi syarat utama agar seseorang diakui keberadaannya. Hal tersebut terlihat ketika Kawi tidak memiliki kartu pengenal, sementara kartu tersebut digambarkan sebagai penentu hidup dan mati; *"Pada saat itu kartu pengenal sama kedudukannya dengan nyawa cadangan. Jika lupa membawa kartu pengenal, berarti lupa membawa nyawa cadangannya"* (hlm. 71). Kutipan ini menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kemanusiaannya, melainkan oleh pengakuan negara melalui dokumen resmi.

Dalam pandangan Spivak, kondisi ini memperlihatkan posisi subaltern yang berada di luar sistem pengetahuan dan pengakuan yang sah. Subaltern tidak memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar karena keberadaannya tidak sepenuhnya diakui oleh negara. Identitas administratif, dalam hal ini, tidak bersifat netral, melainkan menjadi alat kekuasaan yang membatasi ruang hidup masyarakat kecil. Mereka yang tidak memiliki kartu pengenal mudah dicurigai, diawasi, dan diperlakukan secara tidak adil.

Kondisi ketimpangan tersebut juga tampak jelas dalam sistem hukum. Kemiskinan membuat Kawi tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya di hadapan hukum, sebagaimana dinyatakan bahwa *"karena miskin, merana, dan tidak memiliki uang, maka Kawi tidak berkutik di hadapan hukum negeri ini"* (hlm. 160). Hukum tidak hadir sebagai ruang untuk mencari keadilan, melainkan sebagai sistem yang lebih menguntungkan pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Ketika Kawi didampingi oleh pengacara yang tidak berpengalaman, pembelaannya justru dianggap berlebihan oleh hakim; *"Lantaran tidak sanggup membayar pengacara, seorang lelaki muda belum berpengalaman dalam bidang hukum-yang menjadi pengacara cuma-cuma yang mendampinginya-tidak terlalu membantu. Bisa dianggap Kawi hanya sendirian membela diri, yang oleh hakim dianggap terlalu mengada-ada"* (hlm. 159). Hal ini menunjukkan bahwa suara subaltern tidak dipandang penting dan tidak dianggap layak untuk didengar.

Penolakan terhadap permohonan Kawi untuk menjenguk jasad ibunya; *"dia mengajukan permohonan kepada Kepala Penjara agar mengizinkannya menjenguk jasad ibunya. Namun,*

permohonan itu ditolak" (hlm. 163) semakin menegaskan bahwa subaltern tidak memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingan pribadinya, bahkan dalam situasi kemanusiaan yang paling mendasar. Dalam kondisi seperti ini, sebagaimana dinyatakan Spivak, subaltern tidak memiliki posisi untuk berbicara secara bermakna dalam sistem yang mengatur hidupnya (Spivak, 1988). Mereka memang hadir dalam sistem hukum dan administrasi, tetapi selalu berada dalam posisi yang lemah dan tidak menentukan.

Dengan demikian, novel Kawi Matin di Negeri Anjing tidak menceritakan keberhasilan subaltern melawan penindasan, melainkan menunjukkan bagaimana penderitaan mereka terus dipertahankan oleh struktur kekuasaan negara. Kegagalan tokoh-tokohnya untuk keluar dari kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi, tetapi oleh sistem sosial dan politik yang menutup kemungkinan mereka untuk didengar. Novel ini menegaskan pandangan Spivak bahwa subaltern tidak dapat berbicara karena suaranya tidak pernah diakui dalam struktur kekuasaan yang ada.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kekerasan epistemik, praktik representasi yang membungkam suara subaltern, serta menjelaskan bagaimana hegemoni kekuasaan bekerja dalam mempertahankan subalternitas tokoh-tokoh marginal dalam struktur sosial yang digambarkan dalam novel *Kawi Matin di Negeri Anjing* karya Arafat Nur dengan menggunakan teori subaltern Gayatri Chakravorty Spivak. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa representasi subaltern dalam novel tersebut dibangun melalui struktur kekuasaan yang secara sistematis menutup akses tokoh-tokohnya terhadap pengetahuan, representasi diri, dan mobilitas sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh-tokoh subaltern dalam novel tidak berada dalam posisi yang memungkinkan mereka memperbaiki nasib atau menyuarakan pengalaman hidupnya secara sah. Ketidakmampuan tersebut bukan disebabkan oleh kelemahan atau kegagalan individu, melainkan oleh relasi kuasa yang bekerja secara berlapis dan berkelanjutan dalam ranah militer, administratif, hukum, dan ekonomi. Struktur-struktur tersebut membatasi kemungkinan pergeseran posisi sosial subaltern dan meniadakan ruang bagi mereka untuk tampil sebagai subjek yang didengar.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kekerasan epistemik menjadi dasar utama pembentukan subalternitas dalam novel. Pengalaman hidup tokoh-tokoh marginal tidak diakui sebagai pengetahuan yang sah, sementara praktik representasi justru memperkuat pembungkaman melalui pelabelan, stigma sosial, dan perwakilan suara oleh pihak-pihak dominan. Dengan demikian, representasi yang hadir dalam novel tidak membuka ruang artikulasi bagi subaltern, melainkan mempertahankan posisi mereka sebagai objek wacana.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Kawi Matin di Negeri Anjing* tidak menampilkan narasi pembebasan atau keberhasilan subaltern, melainkan menegaskan ketidakmungkinan struktural bagi subaltern untuk berbicara, sebagaimana dirumuskan oleh Spivak. Kontribusi penelitian ini terletak pada penerapan teori subaltern Spivak secara konsisten dalam pembacaan teks sastra Indonesia, sekaligus pada penegasan bahwa subalternitas merupakan kondisi struktural yang tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan moral, psikologis, atau kegagalan individual semata dalam konteks masyarakat pascakolonial.

REFERENSI

Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. (2003). Menelanjangi kuasa bahasa: Teori dan praktik sastra poskolonial (F. Soewandi & A. Mokamat, Terj.). Qalam.

Faruk. (2007). Belenggu pasca-kolonial: Hegemoni dan resistensi dalam sastra Indonesia. Pustaka Pelajar.

Hall, S. (2003). Representation: Cultural representations and signifying practices. London: SAGE Publications Ltd.

Morton, S. (2008). Gayatri Spivak: Etika, subalternitas, dan kritik penalaran poskolonial (W. Indiarti, Terj.). Pararaton.

Ratna, N. K. (2008). Postkolonialisme Indonesia: Relevansi sastra. Pustaka Pelajar.

Ratna, N. K. (2007). Sastra dan cultural studies: Representasi fiksi dan fakta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Raco, J. R. (2010). Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya. Jakarta: Grasindo.

Setiawan, R. (2022). Pascakolonial: Wacana, teori, dan aplikasi. Gambang Buku Budaya.

Spivak, G. C. (1985). The Rani of Sirmur: An essay in reading the archives. History and Theory,

Spivak, G. C. (1988). “Can the Subaltern Speak?” dalam C. Nelson & L. Grossberg (Ed.), Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: University of Illinois Press.

Spivak, G. C. (1999). A Critique of Postcolonial Reason. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sugiarti, Andalas, E. F., & Setiawan, A. (2020). Desain penelitian kualitatif sastra. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

Wellek, R., & Warren, A. (2014). Teori kesusastraan (M. Budianta, Terj.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wahid. (2021). Nilai moral dalam novel Kawi Matin di Negeri Anjing karya Arafat Nur. (Jurnal Bahasa dan Sastra STKIP PGRI Ponorogo), Vol 8 No 2 (2021).

Tillah, dkk. (2021). Ego dan shadow tokoh utama dalam novel Kawi Matin di Negeri Anjing karya Arafat Nur (perspektif psikologi Jungian). (Jurnal Sapala), Vol. 9 No. 01 (2022).

Latifah, dkk. (2022). Bahasa politik novel Kawi Matin di Negeri Anjing karya Arafat Nur. (Jurnal Wacana), Vol. 6 No. 1 (2022).

Andriyanto, dkk. (2021). Subaltern pada novel Jemini karya Suparto Brata (perspektif Gayatri Spivak). (Jurnal Lokabasa). [volume]([nomor]), Vol. 12 No. 1 (2021).

Kholifatu, dkk. (2020). Subaltern dalam novel Arok Dedes karya Pramoedya Ananta Toer: Kajian poskolonial Gayatri Spivak. (Jurnal Stilistika). Vol. 13 No. 1 (2020).

Hikam, Ahmad Ilzamul. (2024). Representasi Ideologi Feminisme Pada Film Sri Asih Karya Joko Anwar. (Jurnal Metalingua). Vol. 9 No. 2 (2024).